



**PERAN DAN FUNGSI SATUAN INTELKAM POLRESTA PATI DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG
PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program
Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh:

RAKHA MARENO ROYNA PUTRA

221003742019664

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN DAN FUNGSI SATUAN INTELKAM POLRESTA PATI DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PERIZINAN
DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RAKHA MARENO ROYNA PUTRA
NPM : 221003742019664

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

AGNES MARIA JANNI WIDYAWATI, SH, M
NUPTK : 5457742643230052

Anggota,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM
NUPTK : 2757741642130072

Anggota,

E N D A R T O, SH., MHUM
NUPTK : 5755739640130052



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

PERAN DAN FUNGSI SATUAN.....	ii
KATA KATA MUTIARA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skirpsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Polri.....	9
B. Tinjauan Khusus Tentang Perizinan.....	14
C. Tinjauan Khusus Tentang Pelayanan Prima.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Tipe Penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27

D.	Metode Pengumpulan Data.....	27
E.	Metode Penyajian Data.....	28
F.	Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA		30
A.	Selayang Pandang Tentang Kepolisian Resort Kota	30
A.1	Batas Wilayah	31
A.2	Struktur Organisasi.....	32
A.3	Personil.....	33
A.4	Kerawanan Gangguan Kamtibmas.....	34
A.5	Kebijakan dan Arahan	36
B.	Peran dan Fungsi Satuan Intelkam dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.....	44
C.	Hambatan-hambatan yang dihadapi Satuan Intelkam dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dan Upaya Mengatasinya.....	61
BAB V PENUTUP.....		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama Kepolisian , khususnya dalam penerbitan izin dan penerimaan pemberitahuan aktivitas masyarakat oleh Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam). Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur, serta hambatan administratif dan teknis yang berpotensi mempengaruhi ketertiban dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai pelaksanaan peran dan fungsi Intelkam dalam pelayanan perizinan kegiatan masyarakat beserta hambatan dan upaya penanganannya. Riset ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis. Data sekunder dihimpun melalui kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan data primer didapat melalui wawancara lapangan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mendapat gambaran terkait praktik pelayanan yang dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Intelkam telah menjalankan fungsi administratif sekaligus preventif melalui pemeriksaan persyaratan, penerbitan Surat Tanda terima Pemberitahuan (STTP), analisis potensi gangguan keamanan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelayanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Kendala utama berasal dari keterbatasan personel, tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata, serta hambatan teknis administratif. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi prosedur, penguatan koordinasi lintas instansi, dan perbaikan sistem pelayanan. Secara umum, pelayanan telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya dan pemanfaatan teknologi agar pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal.